

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak pula sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi sosial ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribus wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.² Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Menurut Mardiasmo, pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatn (budgetary function) yang utama dan sebagai alat pengatur (regulatory function), yang digunakan untuk mebiayai Pengeluaran Pemerintah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah,

² Suryati, Adelina. Pengaruh Pajak Reklame Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. (Jakarta : Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana, 2018). Vol. 9 hlm.501

Pemerintah Daerah harus mampu mengatur dan memiliki kewenangan yang besar untuk mengurus pemerintahan daerah secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya otonomi diharapkan daerah dapat berkembang dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut dapat maju dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.³

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain : pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.⁴ Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame, pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas seluruh penyelenggaraan reklame. Mengenai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Kediri diadakan

³ Suryati, Adelina. Pengaruh Pajak Reklame Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. (Jakarta : Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana). Vol. 9 hlm.501

⁴ Mahardika Putra .SE, Ak, M. Ak, Indra *Perpajakan*.Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia. hlm.15

beberapa pajak dan retribusi salah satunya adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame itu sendiri merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum⁵. Pajak Reklame merupakan salah satu pajak daerah sebagai perwujudan meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam melakukan pemungutan pajak reklame, pemerintah daerah harus membuat ketentuan peraturan yang jelas dan transparan sehingga bagi masyarakat yang akan memasang reklame memahami dan sadar akan kewajiban membayar pajak reklame tersebut⁶.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber pada sektor pajak yaitu berupa pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parker, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTN).

Kota Kediri merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi wisatanya yang sangat banyak serta fasilitas penunjangnya yang menjadikan kota ini sebagai kota dengan potensi wisata yang beranekaragam,

⁵ Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

⁶ Petrus, Sutono. 2023. *Analisis "Jurnal Bisnis dan Akuntansi"*, November :. Vol.24

kota Kediri identik dengan monumen-monumen, museum, dan aneka macam bangunan yang indah. Fasilitas inilah yang menunjang kota Kediri untuk semakin mengembangkan potensi wisata dengan fasilitas tersebut maka wadah pemasaran produk semakin banyak dibutuhkan. Lahirnya media cetak maupun elektronik yang dijadikan modal besar para pengguna sektor pariwisata serta penerangan yang memadai, merupakan salah satu alat yang harus diikuti sertakan demi kelancaran promosi sektor pariwisata yang diminati yaitu reklame dan penerangan jalan. Kedua media ini dianggap sebagai alat alternatif yang menguntungkan dan sangat efektif

Reklame dan penerangan jalan dianggap mampu menarik minat masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata di kota Kediri. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan yang diatur oleh Undang-undang maupun peraturan daerah. Pajak reklame dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan objek pajak ini guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah dan membiayai pembangunan. Sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Kediri, pemerintah mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak reklame dan penerangan jalan. Sesuai dengan tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut dapat disimpulkan :

Tabel 1.1
Pajak Reklame Kota Kediri

Tahun	Target	Realisasi	Berlebih (Berkurang)	%
2016	2.447.859.120,00	1.928.271.095,00	(519.588.025,00)	78,77
2017	1.087.000.000,00	1.467.618.214,00	380.618.214,00	135,02
2018	1.997.000.000,00	1.885.385.539,00	(111.614.461,00)	94,41
2019	2.000.000.000,00	1.296.491.734,00	(703.508.266,00)	64,82
2020	1.265.000.000,00	1.981.817.467,00	716.817.467,00	156,67
2021	1.300.000.000,00	1.406.264.639,00	106.264.639,00	108,17
2022	1.500.000.000,00	1.804.235.380,00	204.235.380,00	112,76

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame Kota Kediri pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 kurang stabil yaitu ditunjukkan dengan naik turunnya pendapatan serta realisasi yang di tetapkan. Penurunan antara target dan realisasi terjadi pada tahun 2016 yaitu presentasi sebesar 78,77 %, yang selanjutnya juga terjadi pada tahun 2018 dan 2019 persentasinya sebesar 94,41 % dan 64,82%. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus melakukan upaya dalam hal meningkatkan pendapatan pajak reklame.⁷

Tabel 1.2
Pajak Penerangan Jalan Kota Kediri

Tahun	Target	Realisasi	Berlebih (Berkurang)	%
2016	21.913.127.403,	22.811.700.424,	898.573.021,00	104,10
2017	24.294.000.000,	25.327.086.036,	1.033.086.036,00	104,25
2018	26.094.200.000,	27.123.563.537,	1.029.363.537,00	103,94
2019	27.450.000.000,	28.116.653.386,	666.653.386,00	102,43
2020	26.550.000.000,	27.348.873.534,	798.873.534,00	103,01

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

⁷ Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

Tabel 1.2 menunjukkan tabel pendapatan serta realisasi pajak penerangan jalan Kota Kediri yang memiliki prentasi tetap setiap tahunnya, sehingga dalam upaya peningkat memungkinkan pemerintah kota Kediri melalui Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Kediri untuk memberi penegasan peraturan atau apresiasi terhadap pengguna jasa penerangan jalan agar mampu menarik pengguna penerangan jalan untuk memenuhi kewajibannya⁸.

Dari fenomena penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang ada di Kota Kediri, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan guna menciptakan tertib administrasi dan tertib dalam penyelenggaraan pajak reklame dan pajak penerangan jalan sehingga proses pemungutan pajak berlangsung lancar, terutama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui pajak reklame.

Beberapa penelitian tentang analisis penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah telah dilakukan Rosanna Purba, dan Rika Mei Hayati G, Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan lapangan, jenis data adalah data sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan

⁸ Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kediri

bahwa secara parsial pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah⁹.

Penelitian *Kedua* dilakukan oleh Adelina Suryanti, Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapati dari wawancara secara langsung, Hasil penelitian ini berkaitan dengan target yang menjadi acuan dalam memungut pajak, target berkaitan dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dicapai. Dengan mengetahui tujuan tersebut, maka akan lebih mudah untuk menentukan target yang tentunya akan berdampak pada realisasi yang tidak jauh dari perkiraan target. Hal ini berarti sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam mencapai tujuan yang sebenarnya akan dicapai pada periode tertentu.

Penelitian *ketiga* dilakukan oleh Fitriani, Heri Irawan berjudul Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai Tinjauan Ekonomi Islam, menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan study dokumen, hasil dari penelitian ini yaitu, Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai salah satunya adalah Pajak Reklame¹⁰. Dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No.4 Tahun 2012. Target dan Realisasi penerimaan pajak reklame selama periode tahun 2013-2016.

⁹ Purba, Rosanna dkk. *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Jurnal Mutiara Akuntansi. Vol.1. No.1(hlm : 25-31)

¹⁰ Fitriani, dan Heri I. *Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai* Tinjauan Ekonomi Islam.

Penelitian keempat dilakukan oleh Eny Kustiyah & Suryani, Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di KOTA SURAKARTA, Berdasarkan sifat analisisnya, jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal (sebab-akibat) antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data-data hasil pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan Asli Daerah. Hasil dari penelitian ini yaitu Efektifitas pajak reklame Kota Surakarta dalam tahun anggaran 2004 hingga tahun anggaran 2008 bersifat fluktuatif, yaitu mengalami kenaikan dan penurunan. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Surakarta dari tahun anggaran 2004 hingga tahun anggaran 2008 bersifat fluktuatif dalam arti mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2004 hingga tahun 2006 kontribusi pajak reklame terhadap PAD terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2004 sebesar 3,4%, tahun 2005 sebesar 3,5%, dan tahun 2006 sebesar 4,5%. Peningkatan kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Surakarta tersebut disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah peran aktif Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya serta kerja keras dari segenap aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan pajak reklame.

Dalam penelitian ini, peneliti akan terfokus aoda efektifitas serta kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri, sehingga berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame

untuk menemukan solusi untuk pengoptimalan penerimaan pajak reklame agar realisasi dari penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan. Maka dalam penelitian ini, penelitian mengambil berjudul **“Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan di Kota Kediri?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan di Kota Kediri sudah efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu antra lain :

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan di Kota Kediri.
2. Untuk menganalisi kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Untuk mengetahui seberapa efektif pemungutan pajak di Kota Kediri

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, masalah – masalah yang akan muncul antara lain :

1. Pajak reklame dan pajak penerangan jalan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan pajak daerah
2. Bagaimana kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan pada penerimaan asli daerah (PAD).
3. Seberapa besar kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam penerimaan asli daerah (PAD).
4. Pajak reklame dan pajak penerangan jalan merupakan salah satu komponen pajak daerah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan keuangan asli daerah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran informasi yang ada dalam penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan atas pajak yang dibebankan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Berfungsi sebagai sarana penambahan ilmu pengetahuan serta wawasan tentang akuntansi perpajakan, yang mencakup pajak reklame.
 - b. Bagi Pihak Lain
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang memberikan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak - pihak yang mempunyai

permasalahan yang sama atau melakukan penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat terhadap pembangunan yang dibiayai oleh pungutan pajak.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan suatu batasan yang memudahkan pelaksanaan penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu terhadap suatu objek. Sedangkan pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan dari masalah yang akan diteliti. Batasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus dan spesifik.

Sehingga batasan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas serta kontribusi penerimaan pajak relame dan pajak penerangan jalan yang ada di kota Kediri.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini agar permasalahan penelitian tidak melebar kemana-mana maka dalam hal ini ditetapkan batasan masalah yaitu pada penelitian ini hanya memaparkan terkait dengan penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan keuangan asli daerah di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

G. Definisi Istilah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2. Pajak

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Menurut Mardiasmo, pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatn (budgetary function) yang utama dan sebagai alat pengatur (regulatory function), yang digunakan untuk mebiayai Pengeluaran Pemerintah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mampu mengatur dan memiliki kewenangan yang besar untuk mengurus pemerintahan daerah secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame, pajak reklame adalah pajak daerah yang

penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah. Reklame yaitu benda, alat atau pembuat media yang berguna untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa yang dapat dibaca dan dilihat oleh masyarakat luas.

4. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik itu yang dihasilkan sendiri ataupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik dari PLN atau bukan PLN.

H. Sistematik Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam tiga bagian yaitu bagaian awal, bagian utama, bagian akhir, untuk lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Mencangkup sampul depan dan sampul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran serta abstrak.

2. Bagian Utama

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. dalam bab pendahuluan ini membahas beberapa unsur lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mendeskripsikan mengenai rumusan masalah secara detail yang ada di bab 1 yang berisi pengertian-pengertian teori yang dibahas dalam penelitian dan juga berisi kajian peneliti terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang paparan data dari hasil penelitian yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan-pembahasan dari teori-teori sebelumnya dan penjelasan dari temuan-teori yang diungkap dari lapangan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan berdasarkan dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada para pengelola obyek/subyek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang

sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup